



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KECAMATAN
MEGALUH

RENJA

2024

RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN MEGALUH
KABUPATEN JOMBANG

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM,
KEUANGAN, DAN EVALUASI

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang tanggal 30 November 2022 nomor 050/10347/415.01/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Megaluh dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Megaluh, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Jombang.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Megaluh masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon saran, bimbingan, dan masukkan dari semua pihak utamanya dari Pemerintah Kabupaten Jombang maupun Dinas Instansi terkait guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Megaluh dimasa yang akan datang.

Megaluh, 14 Juli 2023

CAMAT MEGALUH



Drs. HERI PRAYITNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19670824 198602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, setiap tahun disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 221 menyebutkan Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut kecamatan berada dalam posisi strategis dimana Camat sebagai pimpinan tertinggi harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, juga harus memberikan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Renja merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
- Merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Megaluh.

Mengingat arti penting dari Renja, maka penyusunannya diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja OPD yang dalam hal ini Rencana Kerja Kecamatan Megaluh, penyusunan tersebut harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan mencakup 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom up yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom–Up (Bawah–Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Megaluh Tahun 2024 mengacu pada penyusunan Renstra Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Megaluh Tahun 2024 - 2026 merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai dokumen Pengganti RPJMD dan Renstra (2018-2023) yang telah berakhir sekaligus sebagai landasan pelaksanaan penyusunan RKPD dan Renja PD untuk tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang :

1. Peningkatan kualitas pelayanan public, keamanan dan ketentraman umum;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang unggul serta pengentasan kemiskinan ekstrim;

3. Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah.

Tema/arrah pembangunan daerah tahun 2024 yang harus dapat diwujudkan adalah **“Pembangunan Insfrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul”** serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh Tahun 2023, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 45/D);

18. Surat Edaran Bupati Jombang Tanggal 30 November 2022, Nomor: 050/10347/415.01/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan T Megaluh Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Megaluh Tahun 2024 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pelaku pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, maka tema/arah pembangunan daerah tahun 2024 yang harus dapat diwujudkan adalah “ Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul ”.

Dalam rangka mendukung visi, misi dan tema/arah pembangunan daerah tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Megaluh pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, yang dijabarkan dalam 6 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 12 Kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

➤ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya

b. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

➤ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

➤ **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

a. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

➤ **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

➤ **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

➤ **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan, secara umum capaian kinerja tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja.

Capaian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Megaluh :

1. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh dengan target yang ditetapkan 70,01 realisasi 71,70 (tercapai 101,03%)
2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan dengan indikator kinerja :
 - IKM Kecamatan Megaluh target yang ditetapkan 81,00 realisasi 97,49 (tercapai 106,87%)
 - IPP Kecamatan Megaluh target yang ditetapkan 3,30 realisasi 3,38 (tercapai 101,53%)
 - Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait target yang ditetapkan 100% realisasi 100% (tercapai 100%)
 - Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu target yang ditetapkan 100% realisasi 100% (tercapai 100%)
 - Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu target yang ditetapkan 100% realisasi 100% (tercapai 100%)

Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Megaluh tahun 2022 adalah 101,59% dengan predikat sangat memuaskan.

Anggaran Kecamatan Megaluh tahun 2022 adalah Rp. **2.671.582.863,-** terealisasi Rp. 2.573.525.534,- (tercapai 96,33%).

Berikut disajikan secara terperinci pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2022 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi sekaligus kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut, yakni:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerjanya adalah 100%, dari indikator program yaitu nilai Paten Kecamatan, dimana ditargetkan nilai 81 dapat tercapai nilai 85,50 (105,56%).

Untuk kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi Rp. 3.000.000,- (100%).

Namun demikian semua kegiatan dan sub kegiatan dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerjanya adalah 100% dan kinerja anggaran tercapai 100% dengan penjabaran sebagai berikut:

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi Rp. 3.000.000,- (100%).
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator:
 - a. Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%).
 - b. Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%).

Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- terserap Rp. 3.000.000,- (100%).

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah:

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dapat tercapai 100%. Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 2.640.654.863,- terserap Rp. 2.542.342.534,- (96,28%)

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 2.851.000,- terealisasi Rp. 2.851.000,- (100%).
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu :
 - a. Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%)

- b. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%)
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%)
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%)
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%)

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%). Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- terserap Rp. 1.500.000,- (100%).

- Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA dengan target 2 laporan dapat tercapai 2 laporan (capaian 100%)

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait dengan target 100% dapat tercapai 100%

(capaian 100%).

Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 1.699.500,- terserap Rp. 1.699.500,- (100%).

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum dengan target 12 laporan dapat tercapai 12 laporan (capaian 100%)

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu :

- a. Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%).
- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%).

Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- terserap Rp. 2.100.000,- (100%).

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa dengan target 26 dokumen dapat tercapai 26 dokumen (capaian 100%).

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu :

- a. Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi dengan target 100% dapat tercapai 100% (capaian 100%).
- b. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif dengan target 26 lembaga dapat tercapai 26 lembaga (capaian 100%).

Dan dari kinerja anggaran, dimana anggaran sebesar Rp. 22.628.500,- terserap Rp. 22.611.000,- (99,92%).

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa capaian kinerjanya adalah 100% dimana dari indikator kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu dengan target 26 dokumen dapat tercapai 26 dokumen

(capaian 100%).

- b. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina dengan target 26 lembaga dapat tercapai 26 lembaga (capaian 100%).

3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Kecamatan Megaluh tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan:

1. Ruang pelayanan PATEN kurang representatif
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan PATEN
3. Kurangnya anggaran Kecamatan Megaluh untuk mendukung pelayanan PATEN
4. Terbatasnya jumlah aparatur sipil Kecamatan Megaluh

2. Faktor-Faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan:

1. Dukungan dan komitmen Camat Megaluh, Kepala UPTD/B Se Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Megaluh untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
3. Adanya SOP dan KAK pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja.
4. Perencanaan yang baik.
5. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
6. Kebutuhan administrasi perkantoran untuk menunjang kinerja pelayanan sudah terpenuhi sehingga dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
7. Kompetensi SDM aparatur Kecamatan Megaluh yang belum cukup memadai.

5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target

capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh. Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Megaluh sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh tahun 2018-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Megaluh pada umumnya.
- Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Megaluh.

6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:

1. Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu.
2. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi serta memberikan pendampingan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada OPD terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
5. Pengajuan tambahan anggaran untuk ruang dan sarana prasana pelayanan PATEN
6. Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Megaluh untuk menunjang kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Megaluh.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Megaluh s/d Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh Tahun 2021s/d Tahun 2022

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		N/A	N/A	N/A	51.38	N/A	60,01	N/A	N/A
	<i>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh</i>		N/A	70,02	71,10	71,70	101,03	70,20	N/A	N/A
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	100	3 dokumen	N/A	N/A
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja yang tersusun	N/A	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 laporan	N/A	N/A
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Megaluh yang di fasilitasi	N/A	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	17 orang/bulan	N/A	N/A
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	N/A	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	N/A	N/A
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A	12 kali	12 kali	100	12 dokumen	N/A	N/A
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Megaluh	N/A	N/A	100%	100%	100	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	N/A	17 stel	17 stel	100	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	N/A	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	7 Paket	N/A	N/A
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	N/A	3 jenis	21 jenis	21 jenis	100	20 Paket	N/A	N/A
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	21 orang	-	-	100	4.840 paket	N/A	N/A
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	N/A	N/A	1.100 lembar	1.100 lembar	100	2 paket	N/A	N/A
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	N/A	7.000 lembar	7.000 lembar	7.000 lembar	100		N/A	N/A
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	N/A	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 dokumen	N/A	N/A

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	1kali	12 laporan	12 laporan	100	4 laporan	N/A	N/A
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	N/A	3 jenis	10 jenis	10 jenis	100	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penga daan sarna dan prasarana aparatur	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	1 gedung	0 paket	0 paket	100	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Gedung Kantor	N/A	1 unit	7 unit	7 unit	100	1 Unit	N/A	N/A
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	N/A	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	24 laporan	N/A	N/A
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis Pelayanan Umum	N/A	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100	25 laporan	N/A	N/A
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	N/A	12 unit	12 unit	12 unit	100	12 unit	N/A	N/A
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	N/A	25 unit	12 unit	12 unit	100			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Megaluh yang dipelihara	N/A	3 gedung	3 gedung	3 gedung	100	1 unit	N/A	N/A
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	N/A	34 unit	34 unit	34 unit	100	16 unit	N/A	N/A

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh Tahun 2021s/d Tahun 2022										
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik		N/A	7,86	7,75	8,250	102,74	8,09	N/A	N/A
	IKM Kecamatan Megaluh		N/A	85,50	81	97,49	106,87	82	N/A	N/A
	IPP Kecamatan Megaluh		N/A	3,30	3.30	3,38	101,53	3,40	N/A	N/A
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A	3 laporan	2 laporan	2 laporan	100	1 laporan	N/A	N/A
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A	0	2 laporan	2 laporan	100	1 laporan	N/A	N/A
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	N/A	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	150 orang	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Megaluh	N/A	0	2 dokumen	2 dokumen	100	4 dokumen	N/A	N/A
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	N/A	77,94	80	85,50	106,87	82	N/A	N/A
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	N/A	100%	100%	100%	100	N/A	N/A	N/A
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	N/A	100%	100%	100%	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	N/A	N/A
		Persentase evaluasi	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A

		Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu								
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1.Persentase Raperdes APB Desa / Perubahan APB Desa yang dievaluasi	N/A	100%	100%	100%	100	N/A	N/A	N/A
		2.Jumlah Lembaga Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	100	26 lembaga	N/A	N/A
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	N/A	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Lembaga/ Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	N/A	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	100	26 lembaga	N/A	N/A
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	N/A	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	N/A	13 BUMDesa	13 BUMDesa	13 BUMDesa	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	N/A	13 TP- PKK	13 TP-PKK	13 TP- PKK	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 lporan	N/A	N/A
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
		Persentase Rekomendasi Hasil dan Pengawasan	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A

		Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100	26 dokumen	N/A	N/A
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	26 laporan	26 laporan	26 laporan	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	N/A	N/A	N/A	N/A	100	26 dokumen	N/A	N/A
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda /Perkada dan Trantibum yang dikoordinasi ke Instansi Terkait	N/A	100%	100%	100%	100	100%	N/A	N/A
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan epala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	N/A	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A

		Peraturan Perundang-Undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.								
Rekapitulasi Perkiraan Realisasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh Tahun 2023										
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		INDEKS REFORMASI BIROKRASI	60,01	N/A	N/A	N/A	N/A	60,01	60,01	100
		<i>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh</i>	70,20	N/A	N/A	N/A	N/A	70,20	71,80	102,01
7.01.01	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.01.2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100
7.01.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	100
7.01.01.2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	17 orang/bulan	17 orang/bulan	100
7.01.01.2.02.03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100

7.01.01.2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Megaluh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	20 paket	20 paket	100
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.640 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	4.640 paket	4.640 paket	100
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	2 paket	100
7.01.01.2.06.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.06.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100
7.01.01.2.06.01	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	7 paket	7 paket	100
7.01.01.2.07	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan								
7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100
7.01.01.2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	100
7.01.01.2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	25 laporan	25 laporan	100
7.01.01.2.08.01	3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	12 unit	12 unit	100
7.01.01.2.09.09	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100
7.01.01.2.09.10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	16 unit	16 unit	100
Rekapitulasi Perkiraan Realisasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh Tahun 2023										
		Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,09	N/A	N/A	N/A	N/A	8,09	8,450	102,74
		IKM Kecamatan Megaluh	82	N/A	N/A	N/A	N/A	82	97,59	106,87
		IPP Kecamatan Megaluh	3,40	N/A	N/A	N/A	N/A	3,40	3,50	101,53

7.01.02	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	82	N/A	N/A	N/A	N/A	82	83	102,00
7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	100
7.01.05	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.05.2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100
7.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	150 orang	150 orang	100
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.04	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100

7.01.04.2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	100
7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	100
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.06	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7.01.06.2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	25 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	25 dokumen	25 dokumen	100
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	25 dokumen	25 dokumen	100
7.01.03	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	26 lembaga	100

		Desa/Kelurahan Yang Aktif								
7.01.03.2.01.	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	26 lembaga	100
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Megaluh merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Megaluh, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Megaluh adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Megaluh menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Sampai dengan periode triwulan IV tahun 2022, Kecamatan Megaluh telah menyusun rencana kerja sejumlah 2 dokumen (renja 2022 dan perubahan renja 2021), perubahan renstra 2018-2023 sejumlah 1 dokumen, laporan capaian kinerja (LKjIP) sebanyak 1 dokumen, laporan realisasi kinerja dan anggaran sejumlah 4 dokumen, dan laporan keuangan (CALK) sebanyak 1 dokumen.
2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terlaksananya musrenbang kecamatan, terlaksananya musrenbangdes di 15 desa, koordinasi dan patrol keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Megaluh, terlaksananya penyebaran informasi dan

penyuluhan bagi masyarakat seperti penyuluhan PSN, peringatan HUT RI, Rapat Pleno Rutin PKK setiap bulan, koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KIS, Bansos dan lain-lain, pembinaan administrasi pemerintahan desa, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang meliputi pelayanan KK, perekaman KTP, surat pindah, SKCK, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Megaluh menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Megaluh disajikan dengan tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2019 s/d Tahun 2020 Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD				Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
A	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Megaluh Minimal BAIK	-	-	69,33	63,49	N/A	N/A	
1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Megaluh Minimal BAIK	-	-	69,33	63,49	N/A	N/A	
2	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa	-	-	22 komponen	22 komponen	N/A	N/A	
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum	-	-	8 komponen	8 komponen	N/A	N/A	
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	11 komponen	11 komponen	N/A	N/A	
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya	-	-	16 komponen	16 komponen	N/A	N/A	
B	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			62,25	64,24	N/A	N/A	
6	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100%	100%	N/A	N/A	
7	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	21 rekening kegiatan	21 rekening kegiatan	N/A	N/A	
8	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	-	-	100%	100%	N/A	N/A	
9	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
10.	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun	-	-	-	4x5 M2	N/A	N/A	
11.	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara	-	-	3 Gedung	3 Gedung	N/A	N/A	
12	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	6 unit	3 unit	N/A	N/A	
13	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	-	34 unit	34 unit	N/A	N/A	
14	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	12 unit	12 unit	N/A	N/A	
15	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian	-	-	25 stel	N/A	N/A	N/A	
16	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	-	-	100	100	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD				Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
17	Jumlah dokumen Renstra Kecamatan Megaluh	-	-	-	-	N/A	N/A	
18	Jumlah dokumen Renja Kecamatan Megaluh	-	-	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	
21	Jumlah dokumen LKjIP kecamatan Megaluh	-	-	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	
22	Jumlah dokumen laporan keuangan Kecamatan Megaluh	-	-	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	

TABEL 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021 dan
Pencapaian Kinerja Pelayanan sampai Tahun 2022
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

NO	Indikator	Satuan	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Renstra PD Tahun			Keterangan
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indikator Tujuan : INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai		√		60	60,01	N/A	60,89	51,38	N/A	
2	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Kecamatan Megaluh	Nilai				70,01	70,10	N/A	70,02	71,70	N/A	
3	Indikator Program : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
4	Indikator Kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
5	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen				3	3	N/A	3	3	N/A	
6	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Perangkat Daerah dan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Perangkat Daerah.	Laporan				5	5	N/A	5	5	N/A	
7	Indikator Kegiatan : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
8	Indikator Kegiatan : Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
9	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Megaluh yang difasilitasi	bulan				14	14	N/A	14	14	N/A	
10	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen				0	12	N/A	0	12	N/A	
11	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan PD.	dokumen				1	1	N/A	1	1	N/A	

NO	Indikator	Satuan	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Renstra PD Tahun			Keterangan
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	
12	Indikator Kegiatan : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan Megaluh.	%				0	100	N/A	0	100	N/A	
13	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi.	stel				0	17	N/A	0	17	N/A	
14	Indikator Kegiatan : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
15	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	jenis				3	21	N/A	3	21	N/A	
16	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	jenis				3	10	N/A	3	10	N/A	
17	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	bulan				11	0	N/A	11	0	N/A	
18	Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah pemenuhan barang penggandaan dengan rincian belanja sebesar	Lembar				7.000	7.000	N/A	7.000	7.000	N/A	
19	Indikator Sub Kegiatan : 2. Jumlah pemenuhan barang cetak dengan rincian belanja sebesar	Lembar				1.100	1.100	N/A	1.100	1.100	N/A	
20	Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	Jenis				1	1	N/A	1	1	N/A	
21	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi PD	kali				3	12	N/A	3	12	N/A	
22	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	Jenis				4	5	N/A	4	5	N/A	
23	Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
24	Indikator Sub Kegiatan : jumlah pengadaan gedung kantor/ bangunan lainnya.	gedung				0	0	N/A	0	0	N/A	
25	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengadaan sarana dan prasara gedung kantor	Unit				3	7	N/A	3	7	N/A	
26	Indikator Kegiatan : Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	

NO	Indikator	Satuan	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Renstra PDTahun			Keterangan
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	
27	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	bulan				12	12	N/A	12	12	N/A	
28	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	jenis				8	8	N/A	8	8	N/A	
29	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan benda pos	buah				0	0	N/A	0	0	N/A	
30	Indikator Kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
31	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit				12	12	N/A	12	12	N/A	
32	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	Unit				25	12	N/A	23	12	N/A	
33	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya kec. Megaluh yang dipelihara/ pengecatan gedung/kantor dan rehab gedung pertemuan	gedung				3	3	N/A	3	3	N/A	
34	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara.	Unit				34	34	N/A	34	34	N/A	
35	Indikator Tujuan : INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Nilai		✓		7,65	7,75	N/A	7,75	8,250	N/A	
36	Indikator Sasaran : IKM Kecamatan Megaluh	Nilai				80	81	N/A	85,50	97,49	N/A	
37	Indikator Sasaran : IPP Kecamatan Megaluh	Nilai				3.30	3.30	N/A	3.30	3,38	N/A	
38	Indikator Program : PATEN Kecamatan Megaluh	Nilai				75	81	N/A	77,94	85,50	N/A	
39	Indikator Kegiatan : Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
40	Indikator Sub Kegiatan : Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
41	Indikator Sub Kegiatan : Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
42	Indikator Program : Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	

NO	Indikator	Satuan	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Renstra PDTahun			Keterangan
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	
43	Indikator Program : Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
44	Indikator Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Laporan				3	2	N/A	3	2	N/A	
45	Indikator Kegiatan : Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam.	Laporan				4	2	N/A	4	2	N/A	
46	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan.	Kegiatan				3	2	N/A	3	2	N/A	
47	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	Kegiatan				4	2	N/A	4	2	N/A	
48	Indikator Sasaran : Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
49	Indikator Program : Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
50	Indikator Kegiatan : Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Laporan				12	12	N/A	12	12	N/A	
51	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Trantibum , pelanggaran Perda, pelanggaran Perkada dan PEKAT.	Laporan				16	16	N/A	16	16	N/A	
52	Indikator Sasaran : Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
53	Indikator Program : Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
54	Indikator Program : Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	

NO	Indikator	Satuan	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Renstra PD Tahun			Keterangan
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	
55	Indikator Kegiatan : Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa.	Dokumen				13	13	N/A	13	13	N/A	
56	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Monev Pembinaan ,Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Pelaporan berkala.	dokumen				13	13	N/A	13	13	N/A	
57	Indikator Sasaran : <i>Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu.</i>	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
58	Indikator Program : Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi.	%				100	100	N/A	100	100	N/A	
59	Indikator Program : Persentase Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	persen				100	100	N/A	100	100	N/A	
60	Indikator Kegiatan : Jumlah laporan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	Dokumen				26	26	N/A	26	26	N/A	
61	Indikator Kegiatan : Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga				26	26	N/A	26	26	N/A	
62	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan Monev Perencanaan dan Pembangunan Desa	Desa				13	13	N/A	13	13	N/A	
63	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah BUMDesa yang mengikuti pembinaan	Bumdes				13	13	N/A	13	13	N/A	
64	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah TP PKK yang mengikuti pembinaan	TP PKK Desa				13	13	N/A	13	13	N/A	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD Tahun				Target Renstra PD Tahun	Keterangan
				2019	2020	2021	2022		
	Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi	-	✓	N/A	N/A	60,89	N/A	60,01	
	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Kecamatan Megaluh.	-	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	70,20	
1	Indikator Program Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
2	Indikator Kegiatan : <i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	
4	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	
5	Indikator Kegiatan : <i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
6	Indikator Kegiatan : <i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
7	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	17 orang/bulan	
8	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	
9	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD.	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PDTahun				Target Renstra PD Tahun	Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023	
10	Indikator Kegiatan : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Megaluh	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	Indikator Kegiatan : <i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
13	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	20 paket	
14	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4.840 paket	
15	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	
16	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	
17	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	
18	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	7 paket	
19	Indikator Kegiatan : <i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
20	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	
21	Indikator Kegiatan : <i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
22	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PDTahun				Target Renstra PD Tahun	Keterangan
				2019	2020	2021	2022		
23	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	25 laporan	
24	Indikator Kegiatan : <i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
25	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 unit	
26	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	
27	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	16 unit	
	Indikator Tujuan : INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		√	N/A	N/A	7,86	N/A	8,09	
	Indikator Sasaran : IKM Kecamatan Megaluh		√	N/A	N/A	N/A	N/A	82	
	Indikator Sasaran : IPP Kecamatan Megaluh		√	N/A	N/A	N/A	N/A	3,40	
28	Indikator Program : Nilai Paten Kecamatan Megaluh	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	82	
29	Indikator Kegiatan : <i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
30	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	
31	Indikator Program : Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
32	Indikator Program : <i>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD Tahun				Target Renstra PD Tahun	Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023	
33	Indikator Kegiatan : <i>Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	
34	Indikator Kegiatan : <i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	
35	Indikator Sub Kegiatan : <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	150 orang	
37	Indikator Sub Kegiatan : <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Megaluh</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	
	Indikator Sasaran : Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
38	Indikator Program : <i>Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
39	Indikator Kegiatan : <i>Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Kegiatan	
40	Indikator Sub Kegiatan : <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	
41	Indikator Program : 1. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
42	Indikator Program : 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
43	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	
44	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD Tahun				Target Renstra PD Tahun	Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023	
45	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
46	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	
47	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	
48	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Megaluh dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Megaluh telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Megaluh, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Megaluh sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Megaluh.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Megaluh yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Megaluh sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Megaluh untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wilayah Kecamatan Megaluh sudah bergerak kearah ekonomi maju dengan mayoritas penduduknya tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja tetapi juga sektor industri dan perdagangan. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Megaluh pada tahun 2022 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2023 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kab. Jombang Tahun 2018-2023.
 - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan.
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Megaluh belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P RKPD Kabupaten Jombang tahun 2022 yakni mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih terkadang *crowded* berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e-KTP di Kecamatan Megaluh saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e-KTP terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;
- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Megaluh cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang, yang menangani cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode). Sarana prasarana perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Megaluh terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

- 5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

a. Perencanaan Pembangunan

- Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2018-2023 sehingga menghasilkan output yang lebih aspiratif.
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun PD Kecamatan Megaluh dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Megaluh dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tribrulan IV, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Megaluh melalui 1 (satu) Program rutin dan 5 (lima) program Kecamatan

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Megaluh sampai dengan akhir tribrulan IV tahun 2022 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-4 periodisasi 2018-2023 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2023.

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Butten Up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Megaluh diperlukan aparatur yang cerdas, terampil, bertanggungjawab, inovatif dan kapabel. Hal tersebut berarti aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean goverment* dan *good governance*.

Kecamatan Megaluh mempunyai peran penting dalam proses pembangunan mendukung keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi dan politik di Kecamatan Megaluh membutuhkan sinergitas antar seluruh SKPD, disebabkan terbatasnya anggaran dengan kebutuhan pembangunan yang cukup banyak.

Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kebijaksanaan dalam melihat secara komprehensif demi peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Megaluh.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN MEGALUH

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Megaluh	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.516.330.128	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Megaluh	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.896.206.487	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	5.051.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	2.023.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 dokumen	2.951.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 dokumen	1.691.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	332.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.784.946.421	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.412.722.819	
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Megaluh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ bulan	2.711.075.921	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Megaluh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ bulan	2.340.704.819	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	71.598.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	420.000	
	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/veri fikasi keuangan SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	2.272.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	71.598.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Megaluh	100%	10.600.000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Megaluh	100%	12.000.000	
	Sub Kegiatan : 1.Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8.800.000	Sub Kegiatan : 1.Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	12.000.000	
	Sub Kegiatan : 2. Pengadaan pakaian Seragam PATEN,	Kec. Megaluh	Jumlah Paket, pakaian Seragam PATEN,	1 Paket	1.800.000	Sub Kegiatan : 2. Pengadaan pakaian Seragam PATEN,	Kec. Megaluh	Jumlah Paket, pakaian Seragam PATEN,	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	150.493.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	151.319.950	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	5.228.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.070.040	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	24.169.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	20.072.050	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.840 paket	76.255.600	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.480.000	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.640.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.497.050	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Pket	2.400.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	38.848.300	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	23.900.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Megaluh	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana Aparatur	100%	201.796.597	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Megaluh	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	83.912.226	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	201.796.597	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit		-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Megaluh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Megaluh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 unit	83.912.226	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	135.009.147	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	145.735.960	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	35.509.147	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	52.287.560	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	99.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	93.448.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Megaluh	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	228.433.363	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Megaluh	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	88.492.032	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	Kec. Megaluh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	12 unit	29.275.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kec. Megaluh	Jumlah Kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	12 unit	29.090.000	

	pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	12 unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 gedung	174.998.363	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 gedung	35.242.032	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	16 unit	24.160.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	34 unit	24.160.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Megaluh	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	34.460.000	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Megaluh	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	62.670.000	
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	45.800.000			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	34.460.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	5 laporan	62.670.000	
		Kec. Megaluh	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	45.800.000		Kec. Megaluh	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen		
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Megaluh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	34.460.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Megaluh	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	150 orang	20.070.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	45.800.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	42.600.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Megaluh	Nilai Paten Kecamatan	82	6.500.000	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Megaluh	Nilai Paten Kecamatan	83	6.538.500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Megaluh	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	6.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Megaluh	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	6.538.500	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	6.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	6.538.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Megaluh	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	36.007.500	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Megaluh	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APBDesa yang dievaluasi	100%	50.862.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	32.506.900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	50.862.500	
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa				Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	36.007.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	31.182.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Megaluh	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Megaluh	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	19.680.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Megaluh	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	2.338.000	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Megaluh	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	2.245.000	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 desa	2.338.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 desa	2.245.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	2.338.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	2.245.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12	
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Megaluh	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	14.754.000	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Megaluh	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	1.982.500		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Megaluh	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	14.754.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Megaluh	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	1.982.500		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	14.754.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	1.982.500		
TOTAL				3.718.663.128		TOTAL				3.020.504.987		

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Megaluh sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Megaluh didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kecamatan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Megaluh dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang berkaitan dengan :

- a.** Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Renstra.
- b.** Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.
- c.** Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan monografi kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas collecting data.
- d.** Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Megaluh sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024, maka ditetapkan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN MEGALUH

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Kec. Megaluh	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	
1.1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	
1.1.1	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	
1.1.2	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	
1.2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	
1.2.1	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Megaluh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	
1.2.2	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	
1.2.3	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	
1.3	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Megaluh	100%	
1.3.1	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	
1.4	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	
1.4.1	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	
1.4.2	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	

1.4.3	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	
1.4.4	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	
1.4.5	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	
1.4.6	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Kec. Megaluh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	
1.5	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kec. Megaluh	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	
1.5.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	
1.5.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 unit	
1.6	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Megaluh	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
1.6.1	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	
1.6.2	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	
1.7	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Megaluh	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	
1.7.1	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Megaluh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	
1.7.2	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 gedung	
1.7.3	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Megaluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Megaluh	Nilai Paten Kecamatan	83	
2.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Megaluh	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	

2.1.1	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Megaluh	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
3.1	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Megaluh	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	
3.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Megaluh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	
3.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Megaluh	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	
4.1	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Megaluh	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	
4.1.1	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia..	12 laporan	
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Megaluh	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	
5.1	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban APBDes dengan lengkap	13 desa	
5.1.1	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Megaluh	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	
6.1	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Megaluh	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	78 lembaga	
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	

6.1.1	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Megaluh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Megaluh	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020–2024. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020– 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Sementara itu, Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu :

(1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

- (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
- (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045 yang menjadi bagian integral dari RPJMN Tahun 2020–2024. Upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 dimulai pada periode RPJMN Tahun 2020–2024.

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 ditetapkan lima arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang meliputi :

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 148 (2) disebutkan bahwa RPJMD adalah menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, yang dapat dikatakan bahwa dalam situasi apapun bahwa perencanaan tahunan harus mengacu pada perencanaan jangka menengah. Dan semua itu adalah sebagai salah satu wujud konsistensi terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Sedangkan untuk daerah yang masa RPJMDnya telah berakhir maka dijelaskan pada pasal 147 Permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa tema dan prioritas pembangunan RKPD 2024 mengacu kepada :

1. Sasaran Pokok RPJPD tahun berkenaan
2. RPJMD Provinsi
3. Tema & Prioritas RKPD 2024 menjadi bagian dari RPJMD/RPD yang akan disusun

Sehingga dapat dibuatkan mindmap untuk Tema RKPD Tahun 2024 yaitu Penguatan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Keterpaduan Industri, Perdagangan dan Pertanian yang didukung SDM unggul dan berkarakter, infrastruktur memadai, sertabinovasi pelayanan publik, mindmap tersebut didasarkan kepada :

1. Kolaborasi kebijakan nasional
2. Isu strategis kabupaten Jombang ;
 - a. Percepatan Ekonomi berbasis sector potensial (perdagangan dan industry diprioritaskan hasil agro).
 - b. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
 - c. Penguatan Tatakelola Pemerintahan melalui inovasi dan digitalisasi
 - d. Pencapaian SDM unggul, berdayasaing dan berkarakter.
 - e. Peranserta Politik Masyarakat dan Sistim Politik yang Demokratis
 - f. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan.
 - g. Keharmonisan, Ketentraman dan keamanan
 - h. Kesenjangan Gender

3. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2024-2025:

- a. Struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
- b. Keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa;
- c. keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan lptek yang makin

maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.

- d. sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Arah kebijakan RPJMD Jawa Timur Tahun 2024: Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur, Masyarakat yang adil sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif melalui kerjabersama dan semangat gotongroyong
5. Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023 berdasarkan kondisi empirik:
 - a. Investasi
 - b. Inovasi Produk Unggulan Daerah
 - c. Hilirisasi Ekonomi
 - d. Pertumbuhan Sektor Unggulan
 - e. Daya Saing Pasar

Dari Tema RKPD tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa program prioritas RKPD 2024 adalah :

- a. Percepatan Ekonomi berbasis sector potensial (perdagangan & industry diprioritaskan berbahan baku hasil agro).
- b. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
- c. Penguatan Tatakelola Pemerintahan melalui inovasi dan digitalisasi Pelayanan Publik
- d. Pencapaian SDM unggul, berdayasaing dan berkarakter.
- e. Peranserta Politik Masyarakat dan Sistem Politik yang Demokratis
- f. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan.
- g. Keharmonisan, Ketentraman dan keamanan
- h. Kesenjangan Gender

Guna mendukung Tema dan prioritas Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2024-2025 :

- Struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah

- Keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa;
- Keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi.
- Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

➤ Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Megaluh diarahkan untuk mencapai Visi Bupati Jombang yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”. Untuk Kecamatan difokuskan pada Misi ke 1 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional dengan indikator sasaran adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP).

➤ Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs adalah merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Megaluh diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

➤ **Pengentasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Megaluh. Program dan kegiatan yang dirancang pada RENJA 2024 PD Kecamatan Megaluh yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitas di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

➤ **Pencapaian NSPK dan SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bias dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Megaluh diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

➤ **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Megaluh sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan pembuatan lis, pengrajin sepatu, dan sektor pertanian baik padi, jagung, sayur serta tembakau pada musim tertentu. Disamping itu Kecamatan Megaluh termasuk kawasan yang akan dikembangkan menjadi daerah industri, sehingga akan memiliki dampak yang besar dalam penyediaan lapangan kerja dan menunjang perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Megaluh dan masyarakat Kabupaten Jombang pada umumnya. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Megaluh melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

➤ **Pengembangan Daerah Terisolir**

Daerah terisolir di Kabupaten Jombang juga mulai dikembangkan. Kegiatan pengembangan tersebut diantaranya dilakukan untuk memberi bantuan kepada warga di desa-desa terpencil dan peningkatan infrastruktur jalan jembatan. Di Kecamatan Megaluh tidak terdapat daerah yang terisolir.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

➤ **Jumlah Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 mencakup 6 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yaitu :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

➤ **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- **Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan**

Dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan di Kecamatan Megaluh sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Megaluh dan

melingkupi semua Desa (13 Desa).

➤ **Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya**

Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Renja 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. **3.020.504.987,-**

d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

e. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Megaluh Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MEGALUH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Unsur Kewilayahan								
7.01	Kecamatan								
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kec. Megaluh	100%	2.896.206.487	APBD	Program lanjutan	100%	3.713.585.583
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kec. Megaluh	100%	2.023.500	APBD	Kegiatan lanjutan	100%	8.722.406
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Megaluh	3 dokumen	1.691.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	3 dokumen	5.500.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kec. Megaluh	5 laporan	332.500	APBD	Sub kegiatan lanjutan	5 laporan	1.060.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kec. Megaluh	100%	2.412.722.819	APBD	Kegiatan lanjutan	100%	3.130.829.583
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kec. Megaluh	100%		APBD		100%	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Megaluh	17 orang/ bulan	2.340.704.819	APBD	Sub kegiatan lanjutan	17 orang/ bulan	3,047,829,583
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Megaluh	1 laporan	420.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	1 laporan n	80,800,000
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Megaluh	12 dokumen	71.598.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	12 dokumen	1,694,000
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Megaluh	Kec. Megaluh	100%	12.000.000	APBD	Kegiatan lanjutan	100%	8.050.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapan	Kec. Megaluh	2 paket	12.000.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	2 paket	8.050.000
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Megaluh	100%	151.319.950	APBD	Kegiatan lanjutan	100%	82.030.000
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Megaluh	22 Paket	20.072.050	APBD	Sub kegiatan lanjutan	22 paket	13,100,000
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Megaluh	4 Paket	94.480.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	4 paket	51,500,000
	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Megaluh	4 Paket	5.497.050	APBD	Sub kegiatan lanjutan	4 paket	3,300,000
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Megaluh	1 paket	2.400.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	1 paket	2,330,000
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Megaluh	4 laporan	23.900.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	4 laporan	8,250,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Megaluh	8 Paket	5.070.040	APBD	Sub kegiatan lanjutan	8 paket	3,550,000
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Megaluh	100%	83.912.226	APBD	Kegiatan lanjutan	100%	300.000.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Megaluh	0 unit	-	APBD	Sub kegiatan lanjutan	1 unit	200,000,000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Megaluh	46 unit	83.912.226	APBD	Sub kegiatan lanjutan	46 unit	100,000,000
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Megaluh	100%	145.735.960	APBD	Sub kegiatan lanjutan	100%	117.535.000
	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Megaluh	24 laporan	52.287.560	APBD	Sub kegiatan lanjutan	24 laporan	25,900,000
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Megaluh	5 laporan	93.448.400	APBD	Sub kegiatan lanjutan	5 laporan	91,633,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Megaluh	100%	88.492.032	APBD	Kegiatan lanjutan	100%	69.089.000
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Megaluh	12 unit	29.090.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	12 unit	37,500,000
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Kec. Megaluh	4 gedung	35.242.032	APBD	Sub kegiatan lanjutan	4 gedung	8,500,000
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Kec. Megaluh	34 unit	24.160.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	34 unit	23,089,000
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kec. Megaluh	83	6.538.500	APBD	Program lanjutan	83	5,390,000
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Kec. Megaluh	100%	6.538.500	APBD	Kegiatan baru	100%	5,390,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Megaluh	12 laporan	6.538.500	APBD	Sub kegiatan baru	12 laporan	5,390,000
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Kec. Megaluh	100%	62.670.000	APBD	Program lanjutan	100%	21.575.000
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Kec. Megaluh	100%		APBD		100%	
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	Kec. Megaluh	5 laporan	62.670.000	APBD	Kegiatan lanjutan	5 laporan	21.575.000
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Kec. Megaluh	4 dokumen		APBD	Sub kegiatan lanjutan	4 dokumen	
	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Megaluh	150 orang	20.070.000	APBD	Sub kegiatan Baru	150 orang	15,250,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Megaluh	4 dokumen	42.600.000	APBD	Sub kegiatan lanjutan	4 dokumen	6,325,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Kec. Megaluh	100%	1.982.500	APBD	Program lanjutan	100%	6,285,000
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Kec. Megaluh	100%	1.982.500	APBD	Kegiatan lanjutan	100%	6,285,000
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kec. Megaluh	12 laporan	1.982.500	APBD	Sub kegiatan lanjutan	12 laporan	6,285,000
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan realisasi APBDesa tepat waktu	Kec. Megaluh	100%	2.245.000	APBD	Program lanjutan	-	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	Kec. Megaluh	13 desa	2.245.000	APBD	Kegiatan lanjutan	-	-
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Megaluh	26 dokumen	2.245.000	APBD	Sub kegiatan baru	-	-
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Kec. Megaluh	100%	50.862.500	APBD	Program lanjutan	100%	32.000.000
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Kec. Megaluh	78 lembaga	50.862.500	APBD	Kegiatan lanjutan	78 lembaga	32.000.000
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Kec. Megaluh	13 desa			Kegiatan lanjutan	13 desa	
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kec. Megaluh	4 laporan	31.182.500	APBD	Sub kegiatan baru	4 laporan	26,400,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		Wilayah Kecamatan							
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kec. Megaluh	78 lembaga	19.680.000		Sub kegiatan baru	78 lembaga	5,600,000
					3.020.504.987				3.778.853.853

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi OPD dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Megaluh Tahun 2024 merupakan bagian dari masa transisi pelaksanaan Rencana Pembangunan selama masa kepemimpinan dari Kepala Daerah yang telah habis dan baru akan terisi lagi pada tahun 2026 mendatang. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang pada tahun 2024 adalah : a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketentraman umum, b. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM yang unggul serta pengentasan kemiskinan ekstrem, c. Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah. Sedangkan tema Pembangunan Daerah tahun 2024 adalah “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul”

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Megaluh yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Megaluh. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Megaluh di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya yaitu Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tanggal 31 Maret 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Megaluh berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Megaluh Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- b. Kecamatan Megaluh berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Megaluh Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Megaluh selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024, juga berfungsi sebagai

sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Megaluh Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Megaluh juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Megaluh ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Bupati Terpilih serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang. Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta Desa dalam wilayah Kecamatan Megaluh, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Megaluh Tahun anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan.

Megaluh, 14 Juli 2023

CAMAT MEGALUH



Drs. HERI PRAYITNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19670824 198602 1 001